



MENAKAR AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH: PERAN STRATEGIS LKPJ DALAM TATA KELOLA DI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Arini Faradila

UIN Sunan Ampel Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available online Desember, 2025

arinifara04@gmail.com

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus, mengkaji proses penyusunan, evaluasi, serta tantangan implementasi LKPJ melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang mendasari

meliputi cycle akuntabilitas dan teori organisasi publik, yang menekankan pentingnya proses berkelanjutan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKPJ memiliki peran strategis sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya transparansi data dan keterlibatan masyarakat. Pembahasan menegaskan perlunya peningkatan kapasitas SDM, standardisasi sistem pelaporan digital, serta penguatan partisipasi publik untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas LKPJ. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa LKPJ dapat menjadi alat strategis dalam memperkuat akuntabilitas jika didukung oleh regulasi yang memadai dan komitmen semua pemangku kepentingan. Saran yang diajukan meliputi revisi regulasi, peningkatan

*Corresponding author

E-mail addresses: arinifara04@gmail.com



kapasitas aparat, serta penguatan mekanisme transparansi dan partisipasi masyarakat agar fungsi pengawasan dan akuntabilitas dapat berjalan optimal.

kata kunci: *Akuntabilitas, LKPJ, Tata Kelola Pemerintahan, Sekretariat Daerah, Jawa Timur.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Accountability Statement Report (LKPJ) in improving government accountability at the Regional Secretariat of East Java Province. The approach used is a qualitative case study, examining the process of preparation, evaluation, and challenges of LKPJ implementation through interviews, observation, and documentation. The underlying theories include the accountability cycle and public organization theory, which emphasize the importance of a continuous process and synergy between the executive and legislative branches in strengthening accountability. The results show that LKPJ has a strategic role as an instrument for monitoring and evaluating local government performance, but still faces obstacles such as low data transparency and public involvement. The discussion emphasizes the need to increase human resource capacity, standardize digital reporting systems, and strengthen public participation to improve the quality and effectiveness of LKPJ. The conclusion of this study is that LKPJ can be a strategic tool in strengthening accountability if supported by adequate regulations and commitment from all stakeholders. Suggestions proposed include revising regulations, increasing the capacity of officials, and strengthening transparency mechanisms and public participation so that the oversight and accountability functions can run optimally.

keywords: *Accountability, LKPJ, Governance, Regional Secretariat, East Java.*

Pendahuluan

Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah menjadikan pemerintah memiliki beragam peranan penting dalam menjalankan tugasnya. salah satu peran utamanya adalah sebagai fasilitator, yang mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan serta menjadi penghubung bagi berbagai kepentingan masyarakat. Selain itu,

*Corresponding author

E-mail addresses: arinifara04@gmail.com



pemerintah juga berperan dalam bidang pendanaan anggaran atau permodalan belanja dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat. Selain sebagai fasilitator, pemerintah juga berperan sebagai regulator. Peran ini meliputi penyusunan arah pembangunan dan penyelarasan kegiatan pembangunan melalui penerbitan peraturan. Dengan demikian, pemerintah bertindak sebagai pengawas dan penyeimbang dalam pembangunan daerah, memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.¹

Di bawah koordinasi Sekda, terdapat berbagai biro dan bagian strategis, termasuk Biro Administrasi Pimpinan, Biro Organisasi, Biro Hukum, serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang memiliki peranan krusial dalam menjaga sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Biro ini menjadi garda depan dalam mengawal implementasi kebijakan desentralisasi, memperkuat koordinasi pemerintahan lintas wilayah, dan memastikan tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, serta selaras dengan arah pembangunan daerah.

Dalam kehidupan dunia birokrasi pemerintah, akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memperlihatkan pencapaian misi organisasi. Secara eksistensi, organisasi birokrasi pemerintah dirancang untuk memenuhi kepentingan publik, dan karena itu masalah pertanggungjawaban tindakan dan kebijakan pemerintah kepada publik menjadi fokus dari akuntabilitas publik. Akuntabilitas legal terkait dengan eksistensi mekanisme hukum atau secara spesifik mengembangkan kebijakan seperti undang-undang yang dapat dimanfaatkan oleh publik untuk menantang kebijakan birokrasi dan perilaku pejabat publik.²

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai lembaga yang

¹ Adelia mega Pratiwi, dkk "Peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah" Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 3, Nomor 1, January 2025.
doi<https://doi.org/10.5281/zenodo.14718715>

² Muhammad Sawir "konsep akuntabilitas publik" Universitas Yapis Papua 2017.
<http://repository.uniyap.ac.id/276/1/229023118.pdf>

*Corresponding author

E-mail addresses: arinifara04@gmail.com



bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyampaian LKPJ, diharapkan dapat memastikan bahwa dokumen ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menjadi alat untuk meningkatkan transparansi, efektivitas pengelolaan anggaran, serta

partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LKPJ dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas LKPJ serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan memahami peran dan tantangan LKPJ, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kedudukan hukum dan fungsi strategis DPRD dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia.³ Penelitian ini menegaskan perlunya revisi regulasi yang memperkuat kewenangan DPRD dan pemberian sanksi tegas, serta peningkatan kapasitas anggota DPRD dan transparansi OPD agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.⁴ Sebagai pembanding, lima jurnal lain yang menjadi referensi dalam studi ini memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Dalam penelitian jurnal lain menyoroti akuntabilitas hukum dalam pengelolaan dana desa di tingkat lokal,⁵ sementara jurnal ini memfokuskan analisisnya pada tingkat pemerintahan provinsi dengan cakupan yang lebih

³ Septian, dkk "kedudukan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah menurut undang-undang republic Indonesia nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah" jurnal internasional penelitian dan kajian ilmu sosial, vol 6 edisi 9 2023.

⁴ Zaenal Arifin dkk "Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur: Suatu Studi di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan" Universitas Muslim Indonesia, volume 3, Nomor 8, Agustus 2022.

⁵ Candra, R. A. H. (2023). Mekanisme Penerapan Dimensi Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2021: Studi Deskriptif di Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu - Sidoarjo. *Journal of Education and Research (JEDARR)*, 2(1), 17-33.

*Corresponding author

E-mail addresses: arinifara04@gmail.com



kompleks. Dalam penelitian Juniar dan Hermanto menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menilai pengaruh.

berbagai variabel seperti sasaran kinerja, kepemimpinan, dan akuntabilitas terhadap kinerja organisasi,⁶ berbeda dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi secara mendalam mekanisme LKPJ. Dalam penelitian Resen dan Prayoga serta Arifin sama-sama membahas peran DPRD dalam evaluasi LKPJ, namun terbatas pada konteks normatif dan struktural di Provinsi Bali dan Sulawesi Selatan.⁷ Jurnal ini melengkapi kekurangan tersebut dengan memberikan data empiris dan analisis yang menekankan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong akuntabilitas. Sementara itu, dalam penelitian Aji lebih menekankan pada pendekatan yuridis-normatif terkait politik hukum pasca reformasi,⁸ yang berbeda dengan pendekatan studi kasus dan teori organisasi publik seperti agency theory dan accountability cycle yang digunakan dalam jurnal ini. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dengan menggabungkan analisis teoritik dan data empiris dalam konteks LKPJ di Provinsi Jawa Timur secara lebih komprehensif.

Secara teoritis, studi ini berlandaskan pada beberapa kerangka konseptual penting dalam analisis akuntabilitas pemerintahan daerah. Pertama, Agency Theory menjelaskan relasi antara pemerintah sebagai agen (agent) dan masyarakat atau DPRD sebagai prinsipal (principal), di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandat yang diberikan. Dalam konteks ini, LKPJ berperan sebagai sarana untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan adanya transparansi kinerja.⁹ Kedua,

⁶ Juniar, Z., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Sasaran, Kompetensi Manajerial, Akuntabilitas, Kepemimpinan, dan Kinerja Keuangan terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–18.

⁷ Resen, M. G. S. K., & Prayoga, I. K. G. O. (2019). Peran DPRD Provinsi Bali terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bali. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(1).

⁸ Aji, A. B. (2019). Implikasi politik hukum pengaturan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah pasca reformasi. *Lex Renaissance*, 2(2), 3.

⁹ Hafidah Susila sudarsana, (2013 “Pengaruh Karakteristik Pemerintah

*Corresponding author

E-mail addresses: arinifara04@gmail.com



Accountability Cycle menekankan pentingnya proses yang berkelanjutan dalam akuntabilitas, yaitu dimulai dari pelaporan, dilanjutkan dengan evaluasi, dan diakhiri dengan konsekuensi atau tindak lanjut. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan sekadar menyampaikan laporan, tetapi juga mencakup pengambilan tindakan berdasarkan evaluasi kinerja.¹⁰ Dengan menggabungkan kedua kerangka teori tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana LKPJ dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah, khususnya di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Artikel ini terdiri dari beberapa bagian utama yang membahas berbagai aspek penelitian. **Bagian Pendahuluan** menjelaskan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, kebaruan penelitian, serta rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagian ini menyoroti bagaimana LKPJ merupakan instrumen penting dalam akuntabilitas pemerintahan daerah. Di Jawa Timur, LKPJ berperan strategis, namun masih menghadapi tantangan teknis dan rendahnya partisipasi publik. **Bagian Metode** akan menguraikan pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta analisis tematik dan triangulasi data. **Bagian Hasil** akan menyajikan temuan utama penelitian, LKPJ terbukti berkontribusi pada transparansi dan evaluasi kinerja, dengan capaian indikator makro yang positif, seperti pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. **Bagian Pembahasan** akan menginterpretasikan hasil penelitian LKPJ memiliki fungsi akuntabilitas multidimensi, namun masih terdapat kendala dalam penyusunan data, koordinasi antar-OPD, serta akses dan pemahaman publik. **Bagian Kesimpulan** akan merangkum temuan utama penelitian dan memberikan rekomendasi bagi Setda Provinsi Jawa Timur, termasuk LKPJ yang berperan penting dalam tata kelola yang akuntabel. Penguatan SDM,

Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”
Diponegoro Journal Of Accounting 2(4).

¹⁰ M. Zahwawi (2016) “Model Akuntabilitas Kinerja Skpd Dalam Mewujudkan Good Governance” Jurnal Pemerintahan Dan Politik 1(1).



sistem digital, dan partisipasi publik diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis peran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelitian untuk menggali secara mendalam proses penyusunan, evaluasi, serta tantangan dalam implementasi LKPJ. penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika akuntabilitas pemerintahan daerah melalui mekanisme LKPJ.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan perspektif langsung dari para pemangku kepentingan mengenai efektivitas LKPJ dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis laporan LKPJ tahun-tahun sebelumnya guna memahami pola penyusunan dan implementasi kebijakan yang dihasilkan. Sementara itu, observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk melihat langsung bagaimana proses penyusunan dan evaluasi LKPJ berlangsung. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, di mana temuan utama dikategorikan ke dalam tema-tema yang relevan. Untuk meningkatkan validitas hasil, penelitian ini menerapkan triangulasi data, yakni dengan membandingkan berbagai sumber informasi guna memastikan konsistensi temuan dan memperoleh gambaran yang lebih objektif terkait akuntabilitas pemerintahan daerah melalui LKPJ. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena penyusunan dan evaluasi LKPJ di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam terhadap aparatur

pemerintah dan anggota DPRD, studi dokumentasi terhadap LKPJ tahun-tahun sebelumnya, serta observasi partisipatif selama proses pembahasan laporan.

*Corresponding author

E-mail addresses: arinifara04@gmail.com



Hasil dan Pembahasan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), kepala daerah diwajibkan untuk menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setiap akhir tahun anggaran maupun akhir masa jabatan.

Kewajiban ini menegaskan posisi LKPJ bukan hanya sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen pertanggungjawaban formal dan substansial dari eksekutif kepada legislatif dan masyarakat. Dalam praktik di Provinsi Jawa Timur, makna strategis LKPJ terlihat dari peranannya sebagai wahana integrasi capaian kinerja pembangunan daerah dengan mekanisme pengawasan legislatif.¹¹ Informasi ini menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah, sekaligus sebagai landasan pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan anggaran tahun berikutnya. Tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban kepada DPRD, LKPJ juga merefleksikan akuntabilitas publik.

akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, meskipun belum secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.¹² Hal ini dalam catatan penting bahwa akuntabilitas melalui instrumen LKPJ perlu dioptimalkan bukan hanya pada aspek keuangan, tetapi juga pada dimensi kualitas layanan publik, partisipasi masyarakat, dan outcome pembangunan. Melalui LKPJ, hubungan keagenan ini terwujud dalam bentuk pelaporan kinerja dan penggunaan anggaran. Tidak kalah penting, LKPJ juga menjadi alat untuk mengukur akuntabilitas hukum.¹³

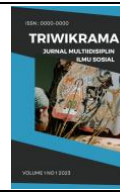
¹¹ Khofifah Indar Parawansa. (2025). Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2024. *Pemerintah Provinsi Jawa Timur*

¹² Juniar, Z., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Sasaran, Kompetensi Manajerial, Akuntabilitas, Kepemimpinan, dan Kinerja Keuangan terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1).

¹³ Candra, R. A. H. (2023). Mekanisme Penerapan Dimensi Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2021: Studi Deskriptif di Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu - Sidoarjo. *Journal of Education and Research*

*Corresponding author

E-mail addresses: arinifara04@gmail.com

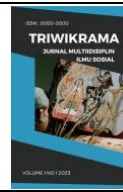


Hal ini relevan jika diadaptasi dalam penyusunan LKPJ provinsi, di mana keterbukaan akses, publikasi laporan, dan pelibatan stakeholder non pemerintah menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Dalam konteks ini, makna strategis LKPJ di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tidak hanya sebagai laporan tahunan, tetapi juga sebagai platform akuntabilitas multidimensi: akuntabilitas administratif, akuntabilitas politik, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, makna strategis LKPJ di Jawa Timur tidak hanya terletak pada dokumen yang disusun, tetapi juga pada proses, substansi, pelibatan aktor, dan output yang dihasilkan, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan responsif.

Secara lebih substantif, capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa sebagian besar indikator strategis telah mencapai, bahkan melampaui, target yang ditetapkan. Kinerja perekonomian daerah tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang berada dalam rentang sasaran pembangunan, tingkat inflasi yang tetap terkendali sesuai dengan batas yang ditetapkan secara nasional, serta penurunan tingkat kemiskinan hingga berada di bawah target perencanaan. Capaian pada aspek keuangan daerah dan indikator pembangunan tersebut tidak terlepas dari peran akuntabilitas publik yang berfungsi sebagai instrumen penguatan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi pemerintah daerah. Kondisi ini sejalan dengan praktik tata kelola pemerintahan di Jawa Timur, di mana keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah turut didukung oleh efektivitas koordinasi antarlembaga, kepemimpinan birokrasi yang adaptif, serta kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Daerah. Meskipun demikian, dalam dokumen LKPJ terbaru, penyajian data keuangan dan capaian program yang telah dipublikasikan melalui platform resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan aksesibilitas dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi laporan tersebut.

Dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting sebagai lembaga pengawasan politik yang menilai kinerja kepala daerah melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, DPRD berwenang memberikan rekomendasi perbaikan



penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari hasil evaluasi LKPJ. Dengan demikian, keberadaan DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah memiliki makna strategis dalam menjamin terlaksananya akuntabilitas politik dan administratif. Salah satu tantangan utama adalah waktu pembahasan LKPJ yang sangat terbatas.

Waktu yang sempit ini seringkali tidak memadai untuk mendalami seluruh isi laporan yang kompleks, mencakup ribuan indikator kinerja, laporan keuangan, hingga data sektoral lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Berdasarkan temuan penelitian, beberapa anggota legislatif mengalami keterbatasan dalam memahami indikator kinerja dan laporan teknis yang disusun dalam LKPJ.¹⁴ Hal ini berpotensi menyebabkan evaluasi lebih berfokus pada isu-isu sektoral tertentu tanpa kajian mendalam secara komprehensif. Padahal, untuk mendukung good governance, proses evaluasi memerlukan pemahaman yang memadai terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, dan capaian program secara holistik.

Tanpa dukungan data yang terbuka dan sistem pengawasan yang kuat, fungsi evaluasi DPRD terhadap LKPJ berpotensi tereduksi hanya menjadi ritual tahunan tanpa substansi pengawasan yang optimal. Selain itu, diperlukan mekanisme monitoring atas pelaksanaan rekomendasi DPRD secara berkala agar fungsi pengawasan tidak berhenti pada tataran evaluasi awal, tetapi berlanjut dalam implementasi program pembangunan.

Meskipun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) memiliki posisi strategis dalam mekanisme akuntabilitas dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan teknis yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan yang dihasilkan. Salah satu kendala utama dalam penyusunan LKPJ adalah keterlambatan pengumpulan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).¹⁵ Tidak jarang, indikator yang dilaporkan oleh OPD tidak sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD atau RKPD, sehingga menyulitkan proses konsolidasi dan validasi data pada tingkat Sekretariat Daerah.

Rendahnya kapasitas teknis aparatur daerah, terutama dalam aspek monitoring dan evaluasi, turut berkontribusi terhadap lemahnya kualitas data

¹⁴ Wiroyudho, B. (2022). Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. *Skrripsi. Universitas Terbuka*.

¹⁵ Wiroyudho, B. (2022). Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. *Skrripsi. Universitas Terbuka*.

*Corresponding author

E-mail addresses: arinifara04@gmail.com



yang dihasilkan. Banyak pegawai di tingkat OPD yang belum memiliki keahlian dalam analisis data berbasis kinerja (performance based analysis), sehingga pelaporan cenderung berfokus pada input dan output administratif daripada capaian outcome dan impact kebijakan.¹⁶ Namun, ego sektoral antarunit kerja sering kali menghambat proses integrasi data. Akibatnya, laporan yang dihasilkan berpotensi bersifat fragmentaris dan kurang mencerminkan integrasi kebijakan lintas sektor.

Selain itu, aspek transparansi dan keterbukaan data publik juga menjadi tantangan tersendiri. Padahal, prinsip akuntabilitas publik mengharuskan laporan tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah diakses, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh masyarakat. Akuntabilitas hukum menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban publik, seperti pada rapat pengesahan LKPJ di tingkat desa, mampu meningkatkan legitimasi, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.¹⁷ Tantangan tantangan teknis ini pada akhirnya berdampak pada kualitas LKPJ sebagai dokumen pertanggungjawaban dan alat evaluasi kinerja. Jika dibiarkan, kualitas laporan akan terjebak pada aspek administratif semata, tanpa mampu menjadi alat strategis dalam memperbaiki kebijakan publik dan meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan, di antaranya:

1. Penguatan kapasitas SDM di tingkat OPD, khususnya dalam aspek monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis kinerja.
2. Standardisasi sistem pelaporan data kinerja lintas sektor melalui penggunaan platform digital terintegrasi yang disertai pelatihan berkelanjutan.
3. Peningkatan koordinasi antarunit kerja dengan memperkuat kepemimpinan kolaboratif di tingkat Sekretariat Daerah.
4. Penguatan mekanisme audit data internal untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi sebelum disusun dalam LKPJ.
5. Perluasan akses publik terhadap LKPJ, misalnya melalui penyediaan

¹⁶ JURNAL PROSES. (2024). Analisis Peran DPRD dalam Evaluasi LKPJ Kepala Daerah.

¹⁷ Candra, R. A. H. (2023). Mekanisme Penerapan Dimensi Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2021: Studi Deskriptif di Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu - Sidoarjo. *Journal of Education and Research (JEDARR)*, 2(1).



ringkasan eksekutif dalam bahasa yang mudah dipahami, infografis, dan forum publik daring.

Dengan perbaikan sistemik dan teknis ini, tantangan dalam penyusunan LKPJ dapat diminimalisir, sehingga LKPJ benar benar menjadi dokumen strategis yang mendukung transparansi, akuntabilitas, evaluasi kebijakan, dan partisipasi publik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tidak hanya memiliki fungsi administratif sebagai laporan tahunan kepala daerah kepada DPRD, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas sebagai representasi akuntabilitas publik. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, akuntabilitas publik mengandung prinsip bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan membuka akses informasi kepada masyarakat atas setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran yang dilakukan.

Dalam teori accountability cycle yang dikemukakan oleh Bovens (2007), akuntabilitas publik tidak hanya berhenti pada pelaporan, tetapi harus dilanjutkan dengan evaluasi, pertanyaan publik, klarifikasi, dan pemberian konsekuensi atas kinerja pemerintah. Jika LKPJ hanya berhenti pada penyampaian dokumen tanpa membuka ruang evaluasi publik, maka akuntabilitas yang terwujud hanya bersifat administratif, bukan akuntabilitas substantif.

Oleh karena itu, untuk memperkuat fungsi LKPJ sebagai representasi akuntabilitas publik, perlu dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Meningkatkan aksesibilitas informasi dengan menyediakan ringkasan LKPJ dalam bentuk bahasa populer, visualisasi data, dan kanal komunikasi interaktif yang mudah diakses masyarakat.
2. Membuka forum konsultasi publik atau dialog publik pascapenyampaian LKPJ untuk menampung aspirasi, kritik, dan rekomendasi masyarakat secara langsung.
3. Mendorong DPRD untuk melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan media massa dalam pembahasan dan evaluasi LKPJ, sehingga hasil rekomendasi lebih inklusif dan berbasis aspirasi publik.
4. Memastikan tindak lanjut rekomendasi DPRD dan publik dengan mekanisme monitoring terbuka yang dilaporkan secara periodik.

Dengan langkah langkah tersebut, LKPJ di Provinsi Jawa Timur dapat



bertransformasi dari sekadar dokumen administratif menjadi alat kontrol sosial, media akuntabilitas publik, dan instrumen penguatan demokrasi lokal.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh isi artikel, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur. LKPJ berfungsi sebagai instrumen strategis yang tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja kepala daerah, tetapi juga sebagai media kontrol sosial dan penguatan demokrasi lokal. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan akses data, kapasitas aparatur yang belum optimal, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pengembangan sistem digital yang terintegrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan kapasitas SDM, standardisasi format laporan, peningkatan transparansi, serta pengembangan platform digital yang memudahkan akses dan partisipasi publik. Dengan perbaikan sistemik dan komitmen semua pemangku kepentingan, diharapkan LKPJ dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai alat pengawasan dan evaluasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Saran

Untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan fungsi strategis LKPJ di Provinsi Jawa Timur, disarankan beberapa langkah yakni, pertama dari penguatan kapasitas teknis aparatur pemerintah daerah, terutama di OPD, melalui pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan berbasis kinerja, monitoring, dan evaluasi berbasis hasil (outcome based monitoring). Yang kedua, standardisasi format dan sistem pelaporan lintas OPD, dengan mengembangkan platform pelaporan digital terintegrasi yang memungkinkan penyatuan data secara otomatis, real time, dan akurat. Dengan implementasi langkah-langkah di atas, diharapkan LKPJ Provinsi Jawa Timur dapat bertransformasi menjadi alat pertanggungjawaban yang substantif, transparan, partisipatif, dan mampu mendorong perbaikan kinerja pemerintahan secara berkelanjutan.



Daftar Pustaka

- Adelia mega Pratiwi, dkk “Peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 3, Nomor 1 January 2025. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.14718715>
- Muhammad Sawir “konsep akuntabilitas publik” Universitas Yapis Papua 2017. <http://repository.uniyap.ac.id/276/1/229023118.pdf>
- Wahyudi, A., & Nugroho, B. (2019). *Efektivitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1).
- Septian, dkk “kedudukan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah menurut undang-undang republic Indonesia nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah” *jurnal internasional penelitian dan kajian ilmu sosial*, vol 6, 9 2023.
- Zaenal Arifin dkk “Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur: Suatu Studi di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan” *Universitas Muslim Indonesia*, volume 3, Nomor 8, Agustus 2022.
- Candra, R. A. H. (2023). Mekanisme Penerapan Dimensi Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2021: Studi Deskriptif di Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu - Sidoarjo. *Journal of Education and Research (JEDARR)*, 2(1), 17–33.
- Juniar, Z., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Sasaran, Kompetensi Manajerial, Akuntabilitas, Kepemimpinan, dan Kinerja Keuangan terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–18.
- Resen, M. G. S. K., & Prayoga, I. K. G. O. (2019). Peran DPRD Provinsi Bali terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bali. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Aji, A. B. (2019). Implikasi politik hukum pengaturan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah pasca reformasi. *Lex Renaissance*, 2(2).
- Hafidah Susila Sudarsana, (2013) “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” *Diponegoro Journal Of Accounting* 2(4).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 11, Number 9, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



- M. Zahwawi (2016) "Model Akuntabilitas Kinerja Skpd Dalam Mewujudkan Good Governance" Jurnal Pemerintahan Dan Politik 1(1).
- Khofifah Indar Parawansa. (2025). Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2024. *Pemerintah Provinsi Jawa Timur*.
- Wiroyudho, B. (2022). Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. *Skripsi. Universitas Terbuka*.
- JURNAL PROSES. (2024). Analisis Peran DPRD dalam Evaluasi LKPJ Kepala Daerah.

*Corresponding author

E-mail addresses: arinifara04@gmail.com